



BAB VI PENGAWASAN

A. Internal

Pengawasan Internal di lingkungan Pengadilan Agama Watampone berdasarkan atas Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan disiplin kerja dalam pelaksanaan pemberian tunjangan khusus kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya, dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor : KMA/080/SK/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di lingkungan Lembaga Peradilan serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 145/KMA/SK/VIII/2007 tanggal 29 Agustus 2007 tentang Memberlakukan Buku IV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Badan-Badan Peradilan. Pengawasan Internal di lingkungan Pengadilan Agama Watampone mencakup 3 (tiga) pengawasan, yaitu :

1. Pengawasan Melekat oleh Atasan Langsung terhadap bawahannya masing-masing secara terus-menerus untuk preventif dan represif.
2. Pengawasan Fungsional dengan cara menunjuk Hakim Pengawas Bidang (HaWasBid) berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Watampone Nomor : W20-A2/SK/087/PS.00.05/VI/2019 12 Juni 2019, yang meliputi berbagai bidang, antara lain:

Tabel 6.1
Daftar Hakim Pengawas Bidang

No.	Nama	Gol	Kedudukan	
			Dalam Dinas	Dalam Pengawasan
1.	Drs. H. Muhadin, S.H., M.H	IV/d	Ketua	Pembina / Pengarah
2.	Dr. M. Basir, M.H.	IV/d	Wakil Ketua	Koordinator Pengawasan
3.	Drs. Kalimang, M.H.	IV/c	Hakim	Bidang Manajemen Peradilan
4.	Drs. Makmur, M.H.	IV/c	Hakim	Bidang Pelayanan Publik dan PTSP

5.	Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H.	IV/c	Hakim	Bidang Administrasi Kepaniteraan Hukum dan Pelaporan
6.	Dra. Siarah, M.H.	IV/c	Hakim	Bidang Administrasi Arsip Perkara dan Minutasi
7.	Dra. Hj. Nurmiati, M.HI.	IV/c	Hakim	Bidang APM
8.	Drs. H. Ramly Kamil, M.H.	IV/c	Hakim	Bidang Administrasi Kepaniteraan Gugatan dan Permohonan
9.	Drs. Adaming, S.H., M.H.	IV/c	Hakim	Bidang Administrasi Keuangan Perkara dan PNPB
10.	Drs. Abd. Rasyid, M.H.	IV/c	Hakim	Bidang Pelaksanaan IKM, Perpustakaan dan Kearsipan
11.	Dra. Hj. Rudianah Halim, M.H.	IV/d	Hakim	Bidang Administrasi Umum (Inventaris) dan Keuangan (Belanja Barang / Modal)
12.	Drs. Salahuddin, S.H., M.H.	IV/d	Hakim	Bidang Administrasi Kepegawaian dan Kedisiplinan
13.	Dra. Ernawati	IV/c	Hakim	Bidang Perencanaan, TI dan Pelaporan
14.	Drs. M. Tang, M.H.	IV/d	Hakim	Bidang SIPP
15.	Drs. H. Muh. Kasyim, M.H.	IV/c	Hakim	Bidang Organisasi e-Court dan Penataan SOP
16.	Dra. Hj. Husniwati	IV/c	Hakim	Bidang Tatalaksanaan, Tata Usaha dan Rumah Tangga
17.	Dra. Hj. St. Masdanah	IV/d	Hakim	Bidang Pengawasan / Pembinaan Panitera Pengganti dan JSP / JSP Pengganti
18.	Drs. Dasri Akil, S.H.	IV/d	Hakim	Bidang Pembinaan Honorer dan Posbakum
19.	Drs. H. Muhammad Arafah Djalil, S.H., M.H.	IV/c	Hakim	Bidang Pelaksanaan Zona Integritas dan RB
20.	Drs. Muslimin, M.H.	IV/c	Hakim	Bidang Administrasi Meja Informasi dan Pengaduan
21.	Dr. H. M. Hasby, M.H.	IV/c	Hakim	Bidang Tata Ruang, Kebersihan dan Penataan Lingkungan
22.	Drs. H. Muhammad Takdir, S.H., M.H.	IV/c	Hakim	Bidang Administrasi Mediasi dan Pengelolaan Register

3. Pengawasan teknis Yustisial bagi hakim dilakukan secara rutin melalui :
 - a. Eksaminasi Putusan
 - b. LKH (Laporan Kegiatan Hakim)

B. Evaluasi

Untuk memastikan jalannya program kerja sesuai dengan perencanaan, maka dilakukan evaluasi terhadap kinerja atau produktivitas kerja yang berhubungan dengan tupoksi masing-masing. Dengan mengadakan evaluasi, maka Pengadilan Agama Watampone dapat menilai sejauh mana keberhasilan dari program yang telah direncanakan selama tahun 2019.

Bentuk evaluasi yang dilakukan antara lain dengan melakukan rapat evaluasi menyeluruh setiap bulan. Adapun hasil evaluasi yang harus selalu menjadi perhatian adalah :

- Segala hal yang menyangkut persiapan menghadapi Surveillance I Akreditasi Penjaminan Mutu, baik mengenai kelengkapan dokumen maupun optimalisasi sarana dan prasarana;
- Peningkatan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan;
- Konsistensi penggunaan aplikasi SIPP bagi Hakim, Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti, Jurusita / Jurusita Pengganti, Kasirdan user SIPP lainnya dalam pelaksanaan tugas sehari-hari;
- Implementasi aplikasi e-Court dan 9 (sembilan) aplikasi Inovasi Ditjen Badilag;
- Reformasi Birokrasi, Zona Integritas, Wilayah Bebas Korupsi (WBK), serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
- Kebersihan dan kerapihan lingkungan kerja / kantor;
- Kedisiplinan dalam kehadiran di kantor;
- Ketepatan, kecermatan dan ketelitian dalam membuat laporan.